

Catatan Awal Kongsi Tionghoa di Tanjungpinang Awal Abad Ke-20

ZULFA SAUMIA

Universitas Jambi

Email: zulfasaumia@unja.ac.id

Abstract

This article aims to reveal the competition, power struggles and influence of the Chinese kongsi in the Tanjungpinang Chinese community in the 20th century. The research method used is the historical method through literature and archive studies by tracing sources in the form of books, government archives, magazines, and newspapers. The results of this study indicate that in Tanjungpinang there were various kongsis such as Tjaap Seng (arak), Eng Bie (tobacco) and Nan Yang (tobacco), Ngee Heng, Quan Teck Hoe, and Gagak Putih. Each kongsis in Tanjungpinang consists of various groups ranging from traders and coolies and has a base all the way to the countryside. Each of them has the same goal, namely control over territory and the economy. To achieve this goal, it is important to get help from local authorities which ends in conflicts like the one between Ngee Heng's kongsi and Quan Teck Hoe.

Keywords:

Chinese;
kongsi;
Tanjungpinang

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengungkap persaingan, perebutan kekuasaan, dan pengaruh kongsi-kongsi Tionghoa terhadap masyarakat Tionghoa Tanjungpinang pada abad ke-20. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah melalui studi pustaka dan arsip dengan menelusuri sumber-sumber berupa buku, arsip Pemerintah Hindia Belanda, majalah, dan surat kabar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Tanjungpinang terdapat berbagai kongsi seperti *Tjaap Seng* (arak), *Eng Bie* (tembakau) dan *Nan Yang* (tembakau), *Ngee Heng*, *Quan Teck Hoe*, dan Gagak Putih. Setiap kongsi Tionghoa di Tanjungpinang beranggotakan berbagai kalangan mulai dari pedagang hingga kuli. Kongsi-kongsi tersebut memiliki basis hingga ke pedesaan. Setiap kongsi tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu penguasaan wilayah dan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, penting mendapatkan bantuan dari penguasa lokal yang berakhir dengan konflik seperti yang terjadi antara kongsi Ngee Heng dan Quan Teck Hoe.

Kata Kunci:

kongsi;
Tanjungpinang;
Tionghoa

Pendahuluan

Orang-orang Tionghoa yang datang ke Tanjungpinang sejak abad ke-18 berasal dari berbagai daerah asal dan marga yang berbeda. Perbedaan daerah asal dan marga ini menyebabkan mereka membentuk suatu komunitas yang terdiri atas daerah atau marga yang sama, seperti komunitas orang-orang hokkian, orang-orang bermarga Lie, dan lainnya. Hal ini disebabkan oleh kepentingan yang sama dan kemudahan untuk beradaptasi di daerah yang baru. Selain membentuk perkumpulan berdasarkan daerah dan marga yang sama, orang-orang Tionghoa Tanjungpinang juga membentuk kongsi (Tai Peng, 1977). Pengertian kongsi menurut *Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsche Indie* sebagaimana dikutip oleh Wang Tai Peng adalah

“kongsi merujuk pada perusahaan, mitra, atau masyarakat dalam arti luas. Kata ini telah digunakan secara umum berabad-abad yang lalu di Nusantara dan secara harfiah telah menjadi bahasa Belanda, Inggris atau berbagai bahasa dengan sebutan yang sama. Kata kongsi berasal dari dialek hokkian yang mengacu kepada orang-orang yang mendedikasikan hidupnya di bandar-bandar dagang yang ada di Jawa atau kepulauan terluar lainnya. Sedangkan di Riau, perusahaan atau usaha bersama yang dimiliki disebut dengan kongsi. Kongsi biasanya didirikan oleh orang-orang yang berasal dari klan yang sama sehingga membentuk kongsi keluarga. (Tai Peng, 1977:1; Trocki 2013; 3).

Pengertian kongsi di atas menunjukkan bahwa etnis Tionghoa membutuhkan kongsi tidak hanya demi menjalin bela rasa di antara mereka, tetapi juga demi kepentingan ekonomi. Etnis Tionghoa yang datang dari berbagai daerah dan profesi yang berbeda akan membentuk suatu kongsi yang berbeda pula (Chan, 2016:107; Ibrahim et al, 2019: 2). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kongsi yang berbagai macam ragam ini terkadang memicu konflik di antara mereka.

Fokus artikel ini adalah catatan awal kongsi Tionghoa di Tanjungpinang pada awal abad ke-20. Periode ini menjadi langkah awal dari menguatnya pengaruh dan kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda di Tanjungpinang. Ada beberapa kajian terdahulu yang patut untuk dirujuk sebagai sumber acuan. Artikel pertama berjudul “Republik Lanfang Kongsi di Kalimantan Barat” oleh Sugiri Kustedja. Sugiri menjelaskan kongsi Lanfang yang berdiri sejak abad ke-18 merupakan kongsi terkemuka di Kalimantan Barat. Kongsi yang mulanya didirikan oleh orang-orang Tionghoa yang bekerja di pertambangan emas yang kemudian menjadi kongsi yang tidak hanya bersaing untuk mendapatkan sumber daya, lokasi emas, dan persediaan air tetapi juga politik dan sosial di Kalimantan Barat. Kongsi Lanfang juga memperluas jaringan ekonomi hingga ke Singapura dengan mengeksport emas sebagai hasil tambang utamanya. Desakan dan perang yang berkepanjangan dengan faksi kongsi lainnya dan dengan Pemerintah Hindia Belanda sejak 1822–1824,

1850–1854, dan 1884–1885 menyebabkan kongsi ini terpuruk dan berakhir pada 1885. (Kustedja, 2016: 255–266; Chan, 2016: 108; Somers, 2008: 70).

Victor Purcell pernah menulis soal permusuhan antara kongsi Tokong (Toh Pek Kong) dan Kongsi Ghee Hin di Singapura dan Malaysia. Perebutan lahan, kuasa ekonomi, dan pengaruh menjadi faktor penting permusuhan yang terjadi di antara keduanya. (Purcell, 1967: 177). Kongsi-kongsi yang ada di kepulauan lain seperti kongsi *Ngee Heng* didominasi oleh suku *Teochiu*, kongsi *Quan Teck Hoe (Ghi Hok)* (Comber, 1959: 12) yang didominasi oleh suku *Hokkian* dan terakhir adalah kongsi Gagak Putih (*Hokkian* atau *Teochiu*) yang dibawa oleh para pedagang dan kuli. Berbagai kongsi yang berbeda-beda ini tentunya akan memberikan warna berbeda dalam mempertahankan hegemoni yang mereka miliki. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah (1) Apakah kongsi-kongsi tersebut terlibat dalam berbagai tindakan kriminalitas yang ada di Tanjungpinang? (2) Bagaimana tindakan yang diambil oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam melakukan penertiban kongsi-kongsi yang dianggap merugikan pemerintah?

Kemunculan Kongsi Tionghoa di Tanjungpinang

Penjelasan mengenai kongsi pertama di Tanjungpinang sulit untuk dilacak. Sejarah terbentuknya kongsi tidak dapat dipisahkan dari sejarah kedatangan orang-orang Tionghoa di Tanjungpinang. Meskipun tidak dapat diketahui secara pasti waktu kedatangan orang-orang Tionghoa ke Tanjungpinang, tetapi menurut beberapa sumber, kedatangan orang-orang Tionghoa ke Tanjungpinang memiliki hubungan dengan perkebunan gambir di sana. Pada 1740-an, bangsawan Bugis yakni Daeng Celak mendatangkan orang-orang Tionghoa dalam jumlah besar secara bertahap untuk bekerja di perkebunan gambir miliknya. Sejak saat itu, orang-orang Tionghoa mulai menetap dan membentuk komunitas di sana. (Trocki, 2016: 2; Trocki, 2013: 33; Andaya 1982: 189; Begbie, 1967: 95; Lyons, L, 2013: 121)

Pada mulanya, pemimpin dalam komunitas Tionghoa dikenal dengan nama *kangchu*. *Kangchu* merupakan sistem kepemimpinan Tionghoa lama atau tradisional yang mendapat pengaruh dari Johor sejak abad ke 18. *Kangchu* berasal dari bahasa Teochiu yakni “*kang*” yang artinya kepala dan “*chu*” yang artinya sungai, jadi jika dua kata tersebut digabungkan maka akan menjadi *kangchu* yang memiliki arti kepala sungai. Orang-orang Tionghoa yang membuka ladang gambir dan lada di sekitar muara sungai dipimpin oleh seorang *kangchu* (kepala sungai). Gelar *kangchu* diberikan oleh penguasa Melayu dan Bugis Riau kepada seorang kepala suku Tionghoa yang mendapatkan surat hibah tanah dan wewenang untuk membuka lahan gambir, mengumpulkan pajak, menjalankan sistem pemerintahan otonom dan lainnya. Menurut Trocki, sistem *kangchu* adalah posisi yang diberikan kepada orang-orang Tionghoa sebelum adanya sistem kapitan pada 1825

(Trocki, 1976: 13–133, Begbie, 1967: 304–306).

Perdagangan gambir pada masa ini menjadi instrumen penting untuk mengamankan suplai kebutuhan makanan pokok bagi masyarakat Tanjungpinang (Riau). Kapal-kapal yang mengangkut gambir tidak hanya ke Pulau Jawa tetapi hingga ke Singapore, Siam dan Cina. Hal ini menunjukkan bahwa Tanjungpinang menjadi satu-satunya daerah dengan intensitas perdagangan gambir yang tinggi. Selain dari perdagangan gambir, Tanjungpinang yang berada di kawasan strategis menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal dagang dan menjadi kawasan entrepot di masanya, sehingga banyak orang-orang Tionghoa yang berdatangan tidak saja menjadi kuli tetapi juga ada dari kalangan pedagang terutama orang-orang Hokkian.

Terbunuhnya Raja Melayu dan Raja Bugis saat melarikan diri ke Pulau Lingga setelah kekalahan mereka melawan Belanda pada 1784, menyebabkan sebagian besar orang-orang Melayu dan Bugis melarikan diri ke Pulau Lingga. Dengan berpindahnya sebagian besar orang-orang Melayu dan Bugis, orang-orang Tionghoa yang tinggal di sana, terutama etnis Teochiu, mengambil alih lahan-lahan gambir (Trocki, 1976: 136–137). Meskipun berada di bawah kekuasaan Belanda, aktivitas perdagangan sepenuhnya berada di tangan orang-orang Tionghoa.

Orang-orang Tionghoa pun mengangkat dua orang kapitan di Tanjungpinang karena terdapat dua komunitas Tionghoa yakni Hokkien atau Amoy dan Teochiu atau Canton. Hampir semua ladang gambir dan lada di bawah kuasa Kapitan dari komunitas Teochiu, sedangkan Hokkien menguasai Pelabuhan dan perdagangan. (Trocki 2013:42) tambah footnote Orang-orang Teochiu yang membutuhkan dana untuk mengolah lahan-lahan perkebunan meminjam dana kepada orang-orang Hokkian yang dikenal sebagai seorang pedagang dan peminjam uang. Dengan modal yang dimiliki oleh orang Hokkian dan kemampuannya dalam memperdagangkan hasil bumi, mengoperasikan pelabuhan dan menguasai jaringan perdagangan, secara lambat laun orang-orang Hokkian semakin memperkuat posisinya di tingkatan ekonomi dan sosial (Xiaodong, 2015: 51).

Orang-orang Hokkian banyak yang bergabung dalam kongsi besar yang dikenal dengan nama Kwan Tec Hoe atau Ghi Hok, dan orang-orang Teochiu dengan kongsinya bernama Ghee Hin atau Ngee Heng. Kedua kongsi ini merupakan perpanjangan tangan dari kongsi yang sama yang berpusat di Singapura (Trocki, 1976: 144–145). Sementara itu, terdapat beberapa orang Tionghoa lainnya (apakah terdiri dari Teochiu, Hokkian atau kelompok suku lainnya) bergabung dengan kongsi yang bergerak di bidang perkebunan bernama Siang Boe Kiok yang berdiri sejak 1912.¹

1) Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie, 1912, hlm. 491

Kontestasi Ekonomi di antara Kongsi-kongsi Awal Abad ke-20

Di Tanjungpinang, sejauh penelusuran yang dilakukan di Arsip Nasional maupun hasil diskusi dengan beberapa orang tua di Tanjungpinang, penulis memperoleh keterangan mengenai tiga kongsi kuat di Tanjungpinang yakni kongsi Ngee Heng atau Ngi Hing (didominasi oleh orang Teochiu), kongsi Ghi Hok atau Quan Teck Hoe (didominasi oleh orang-orang Hokkian) dan Gagak Putih.

Dalam praktiknya, ketiga kongsi ini mengalami kontestasi baik secara politik, ekonomi dan sosial. Kontestasi memuncak pada 1847/1857 dalam bentuk insiden yang dikenal sebagai insiden 24 martir. Menurut informasi lisan yang dipaparkan oleh Ng Chin Keong dalam tulisannya, anggota dalam pemberontakan langsung membunuh seorang kapitan Tionghoa di Senggarang. Oleh karena itu, Belanda mengambil alih dan menghukum tersangka dalam pembunuhan tersebut serta melakukan pengawasan secara ketat terhadap orang-orang Teochiu di Senggarang. (Chin Keong, 1976: 31)

Pecahnya konflik antara kongsi Ngee Heng dan kongsi Ghi Hok. Menurut laporan dari Buckley (Charles, 1902: 463; Trocki, 1976: 144–145) (seorang Resident di Singapura) dalam laporannya menjelaskan penyebab dari konflik tersebut adalah keberpihakan dan terbentuknya aliansi antara Yamtuan Muda (penguasa Bugis) dengan kongsi Quan Teck Hoe. Keberpihakan Yamtuan Muda dengan kongsi Quan Teck Hoe yang mayoritasnya adalah kongsi suku Hokkian bisa saja disebabkan oleh penguasaan perekonomian Tanjungpinang oleh orang-orang Hokkian, sehingga kongsi lain seperti Ngee Heng kurang mendapat perhatian dari penguasa Bugis tersebut. Pernyataan ini didukung oleh argumen Xu Xiadong (Xiadong, 2015: 51) dalam tulisannya yang menyatakan bahwa posisi orang-orang Hokkian sebagai seorang pedagang yang memiliki jaringan ekonomi dan sosial yang kuat semakin menyingkirkan posisi orang Teochiu dalam hal ekonomi dan sosial secara perlahan sehingga keberpihakan sekecil apapun dari penguasa lokal akan memicu terjadinya konflik di antara kedua kongsi tersebut.

Akibatnya, Tan Tae Hoe yang berasal dari kongsi Ngee Heng tidak menerima hal tersebut sehingga menimbulkan kerusuhan. Penjelasan dan data lebih lanjut mengenai proses kerusuhan, suasana di Tanjungpinang pada saat itu, jumlah korban, seberapa besar dampak sosial, ekonomi, politik dan budaya di Tanjungpinang, serta runtutan peristiwa tersebut sangat sulit untuk ditelusuri dan diperlukan penelitian lebih dalam mengenai hal ini. Namun dari data yang diperoleh, konflik tersebut dapat diselesaikan atas bantuan dari personel keamanan pemerintah kolonial Inggris di Singapura dan pemerintah pusat Hindia Belanda di Batavia yang keduanya memberikan bantuan keamanan dan ketertiban kembali. Sayang sekali peristiwa kerusuhan yang sedemikian penting ini masih memerlukan penjelasan lebih rinci mengenai bentuk tindakan apa saja yang diambil dan berbagai jenis upaya yang dilakukan

kedua belah pihak baik dari kolonial Inggris maupun Pemerintah Hindia Belanda dalam menyelesaikan konflik tersebut. Akan tetapi, dalam laporan resmi Pemerintah Hindia Belanda, tertulis pada 1860 suasana permukiman Tionghoa pascakerusuhan yang terjadi antara kongsi Ngee Heng dan Quan Teck Hoe kembali seperti biasa, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kongsi rahasia ini masih ada dengan berbagai aktivitasnya yang tersembunyi tanpa terlacak oleh pihak keamanan di Tanjungpinang.²

Selanjutnya, Kongsi Ghi Hin yang jarang terdengar kabarnya dari sumber tertulis lainnya kembali terlihat telah mengadakan pertemuan anggota sejak bulan September 1917. Pertemuan tersebut kemudian dihentikan oleh pihak kepolisian untuk sementara waktu setelah ditemukannya sejumlah daftar anggota yang terlibat dalam kongsi ini. Berdasarkan daftar nama anggota tersebut, polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang namanya tercantum pada daftar nama tersebut, seperti di daerah Lingga dan Sanibo (Afdeeling Tanjungpinang). Tindakan penangkapan ini dilakukan berdasarkan kepada laporan masyarakat tentang anggota kongsi rahasia yang kerap berujung pada perkelahian antar anggota kongsi ini, sehingga mengganggu ketertiban dan keamanan penduduk.³

Terdapat hukum yang melarang orang-orang Tionghoa untuk masuk ke kongsi yang dianggap bertentangan dengan Pemerintah Hindia Belanda, membantu, menyimpan buku, lambang, bendera, dan simbol-simbol lainnya dalam bentuk apapun, meskipun dalam pelaksanaan di lapangan diserahkan semuanya kepada pejabat pemerintah setempat. Di Tanjungpinang juga terdapat peraturan yang melarang orang-orang Tionghoa untuk bergabung dalam kongsi lainnya yang bernama Gagak Putih. Kongsi ini adalah kongsi yang dibawa oleh orang-orang Tionghoa yang berasal dari Peking (sekarang Beijing). Anggota kongsi Gagak Putih adalah para pedagang yang berdagang di Singapura, Hindia Belanda dan pulau-pulau yang berada di wilayah selatan. Selain itu, kongsi juga memiliki anggota yang berasal dari kalangan pekerja atau buruh yang dikenal dengan kongsi buruh. Sama halnya dengan kongsi “rahasia” lainnya, jika ketahuan oleh aparat keamanan menjadi bagian dari kongsi ini, maka akan ditangkap dan dipenjara selama tiga bulan.

Meskipun mendapatkan hukuman penjara, tetapi hukuman ini tidak memberikan efek jera kepada anggota kongsi karena dalam pelaksanaannya, di sana mereka masih mendapatkan makanan yang “enak” dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ringan. Bahkan, jika ada anggota kongsi yang berhasil lolos dari penangkapan, maka ia akan melarikan diri ke luar

2) *Koloniaal Verslag*, 1862, hlm.12

3) Kongsi rahasia tidak hanya ada di perkotaan, tetapi juga terdapat di perkebunan, yang mana para kuli-kuli tersebut membentuk suatu kongsi akibat ketidakpuasan kepada pemilik perkebunan yang sering bertindak semena-mena sehingga kongsi ini sering melakukan penyerangan kepada asisten kebun, pemogokan dan kerusuhan yang dilakukan secara terorganisir *Koloniaal Verslag*, 1915, hlm.22-23

negeri selama satu bulan, dua bulan bahkan tiga bulan lalu kembali ke Tanjungpinang. Longgarnya aturan penertiban dan penangkapan terhadap kongsi ini menyebabkan masyarakat mempertanyakan penegakan hukum serta mempertanyakan bahaya atau tidaknya keberadaan kongsi karena longgarnya aturan yang dibuat tersebut (Tagliacozzo, 2005: 67).⁴

Atas desakan masyarakat dan kekhawatiran pemerintah kolonial akan bertambahnya masyarakat yang menjadi anggota kongsi. Pemerintah pun kemudian mulai mengambil tindakan dengan melarang semua aktivitas dan bentuk kongsi yang ada di Tanjungpinang. Tindakan ini sebagai salah satu bentuk pengamanan danantisipasi kerusuhan antarkongsi dan berbagai tindakan kejahatan yang dilakukan oleh kongsi tersebut. Kongsi yang mendapatkan tindakan pembubaran salah satunya adalah kongsi Ngi Hing pada 1923. Buku-buku dan kertas-kertas yang berhubungan dengan kongsi tersebut disita aparat kepolisian.⁵ Kongsi Ngi Hing dan kongsi lainnya yang kemudian dilarang tidak terdengar lagi aktivitasnya di kemudian hari.⁶ Apakah kemudian kongsi-kongsi besar ini menghilang begitu saja, atau jangan-jangan mereka mampu untuk melebur dalam perkumpulan atau kongsi lain atau bertransformasi menjadi bentuk kongsi dan perkumpulan baru tetapi masih dengan anggota dan orang-orang yang sama.

Tidak semua kongsi dibubarkan oleh pemerintah kolonial. Kongsi besar milik orang Tionghoa yang bertahan hingga kedatangan Jepang dapat ditemukan di Senggarang yang bernama kongsi Nguang Hak Heng. Kapan kongsi ini berdiri tidak diketahui secara pasti mungkin sekitar pertengahan abad ke 19. Kongsi Nguang Hak Heng merupakan kongsi dagang yang mengumpulkan dan menjual semua komoditi perkebunan maupun barang lainnya yang datang dari ke Senggarang dari Singapura maupun daerah

4) *Koloniaal Verslag*, 1915, hlm. 22-23

5) "Uit Onze Oost: De Chineezen Kwestie", *De Maasbode*, 05-03-1913 No 12325. Tindakan Pemerintah Hindia Belanda mengenai kongsi ini telah diatur melalui peraturan pemerintah tahun 1907, dalam *Staatsblad* No 271 tahun 1907 tentang penanggulangan perkumpulan kongsi rahasia. Dengan demikian, tindakan pencegahan terhadap berbagai kejadian kriminalitas tersebut. Aparat keamanan juga perlu mengambil tindakan untuk mengamankan kongsi tersebut dengan cara melakukan penangkapan dan penertiban, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum terlaksana secara maksimal. *Koloniaal Verslag* 1915, hlm. 22-23

6) ANRI Alg Sec GB TZG AG No 7659, "Vervolg Memorie Betreffende de Residentie Riouw", op.cit, hlm. 14. Lebih lanjut pada *Koloniaal Verslag* 1924, hlm. 15. Pada wawancara penulis dengan salah seorang pengurus klenteng di Senggarang, dikatakan bahwa terdapat dua kongsi besar yang ada di Senggarang yakni Ngi Ang dan Ngi Heng (Ngi Hing). Apakah Ngi Heng ini sama dengan Ngi Hing yang dimaksud, namun dari cerita orang tua dulu, kongsi/kongsi Ngi Heng ini dulunya dipimpin oleh seorang Kapiten atau orang terkemuka pada masanya. Sejarah hingga alasan ditutupnya kongsi ini tidak diketahui sebab yang pasti, kongsi tersebut ditinggalkan dan berubah fungsi menjadi tempat ibadah (klenteng) oleh masyarakat Tionghoa. Dapat ditarik kesimpulan jika dilihat dari penjelasan sumber kolonial dan wawancara di atas besar kemungkinan bahwa kongsi ini ditutup atau ditinggalkan karena larangan dari Pemerintah Hindia Belanda. *Wawancara*, Joni, Senggarang. 13-12-2017

lainnya. Salah seorang kepala kongsi bernama Tan Swie Kie pernah terpilih menjadi letnan di Senggarang oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1916 hingga kedatangan Jepang. Terpilihnya Tan sebagai letnan tidak lepas dari pengaruh yang dimilikinya dalam perdagangan dan sosial sehingga ia disegani oleh masyarakat Tionghoa di Senggarang. (RAN 1917–1942; Wawancara, Joni (Hong Chuang), Senggarang, 13-12-2017).

Beberapa kongsi kecil lainnya yang tercatat dan bertahan cukup lama adalah Kongsi Tjang Tju Tjeng Ho (kongsi pemotongan hewan), Kongsi Sin Hap Seng (kongsi arak), Kongsi Thian Ho Kong, kongsi Eng Bie (kongsi tembakau), Kongsi Nan Yang (kongsi tembakau) dan kongsi lainnya yang mulanya berawal dari kongsi milik keluarga.⁷(Tanpa nama, 1994: 8). Asumsinya adalah kongsi-kongsi kecil di atas merupakan pecahan dari kongsi besar seperti Ngi Hing dan Quan Teck Hoeyang yang telah dibubarkan dan dilarang oleh Pemerintah Belanda, sehingga kongsi-kongsi ini fokus pada satu komoditi dagang saja.

Kriminalitas Bermotif Ekonomi Awal Abad ke-20

Sejatinya, tujuan utama berdirinya kongsi bagi orang-orang Tionghoa adalah untuk memajukan perekonomian komunitas Tionghoa. Besarnya pengaruh kongsi di Tanjungpinang maupun Senggarang ternyata tidak mampu untuk menjangkau semua lapisan masyarakat Tionghoa seperti pekerja kasar di perkebunan. Seringkali para pekerja di perkebunan melakukan tindakan-tindakan “kriminal” dalam kacamata kolonial baik yang berdampak terhadap mereka sendiri maupun yang melibatkan mereka. Salah satu contoh dari kasus kriminalitas yang berdampak terhadap orang-orang Tionghoa adalah kasus pencurian penyadap karet milik perkebunan karet orang-orang Tionghoa di Tanjungpinang pada 1930. Kasus ini melibatkan 8 orang darat yang bekerja di perkebunan tersebut. Mereka telah melarikan diri dengan membawa 14 pisau penyadap karet yang diduga akan digunakan di tempat lain. Berdasarkan penyelidikan oleh kepolisian dan mandor perkebunan diketahui bahwa ke 8 orang kuli tersebut adalah orang yang sama dan memang sering melarikan diri dan mencari majikan-majikan baru. Selama proses penyelidikan dan beberapa pertemuan dengan pemimpin kelompok Orang Darat tersebut serta beberapa Orang Darat (terdiri atas beberapa orang-orang laki-laki dan perempuan) diperoleh hasil yakni pengembalian pisau penyadap tersebut dan penyelesaian kasus ini berdasarkan hukum adat dan hukum yang berlaku di Riau.⁸

Contoh kasus yang lain terjadi pada Februari 1912, saat kuli-kuli kontrak (yang tidak diketahui latar belakang etnisnya) di perkebunan Bulau

7) Kongsi di atas merupakan donatur tetap maupun biasa untuk kelancaran pembangunan maupun aktivitas belajar murid di sekolah bernama sekolah Toan Pun. Tidak terdapat rincian lebih lanjut mengenai kongsi ini. ANRI Alg Sec GB TZG AG No 7659, *Vervolg Memorie Betreffende de Residentie Riouw*, hlm. 42.

8) W Schols, *MvO*, 1938, hlm. 133-134.

(*afdeeling* Tanjungpinang), membuat kegaduhan di permukiman orang-orang Tionghoa saat perayaan Imlek. Penyebab kuli kontrak ini membuat kegaduhan tidak diketahui secara pasti, tetapi dengan segera polisi mengambil tindakan dengan menangkap 9 orang yang diduga sebagai provokator, sehingga perayaan Imlek dapat terlaksana dengan lancar.⁹

Contoh kasus kriminal yang melibatkan orang-orang Tionghoa sebagai pelaku kejahatan adalah penyerangan yang dilakukan oleh Tan Kek Min pada seorang Eropa pemilik perkebunan. Tan Kek Min mengaku bahwa penyerangan tersebut ia lakukan karena tuntutan atas tunggakan pembayaran upah tidak pernah mendapatkan respon dari pemilik perkebunan. Kejadian tersebut berlangsung pada 30 April 1931, saat ia dan sekitar 12 kuli lainnya menyerang pemilik perkebunan hingga terluka parah. Meskipun yang melakukan penyerangan berjumlah 12 orang, pihak keamanan tetap menangkap semua kuli yang ada di perkebunan sebanyak 32 orang. Di antara kuli-kuli tersebut terdapat 9 orang diantaranya yang memiliki buku ajaran komunis. Keesokan harinya ditangkap 3 orang yang diidentifikasi sebagai pemimpin mereka yakni Lie Tsoe Hoa (pemilik toko obat), Tan Sio Tek (pemilik kedai kopi) dan Lie Tay Woe (tukang cukur). Dari hasil pemeriksaan dokumen, dari ketiga nama tersebut hanya nama terakhir yakni Lie Tay Woe yang ditangguhkan penangkapannya. Bantuan dari kongsi pekerja yakni Foe Hok Soan dan Foe Hok Djoei berusaha untuk melakukan mediasi atas kasus tersebut tetapi gagal. Pemilik perkebunan juga mengetahui keterlibatan organisasi komunis dalam aksi para kuli tersebut, tetapi ia tidak menjelaskan lebih lanjut kepada pemerintah karena takut akan keselamatan dirinya.¹⁰

Tindakan kriminal lainnya yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa terjadi pada 1929, yaitu pembunuhan J.W. Futcher, seorang pria insinyur berusia 50 tahun asal Inggris, belum menikah, dan satu-satunya pria berkulit putih yang tinggal dan memiliki perkebunan nanas di Tanjungpinang. Seperti yang dijelaskan oleh koran *Straits Times*, peristiwa pembunuhan ini terjadi pada pukul setengah tiga sore saat ia berjalan-jalan di sekitar rumahnya dan tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang Tionghoa yang berjumlah 30 orang. Mereka menyerang Futcher dengan senjata tajam berupa parang. Ia sempat melarikan diri hingga 100 meter hingga akhirnya meninggal dengan 30 luka tusukan dan tangan kanannya yang hilang saat polisi menemukan jasadnya. Bahkan, di beberapa koran, diberitakan bahwa mayat Futcher dimutilasi dengan kejam. Malam harinya, salah satu pelaku menyerahkan diri ke kantor

9) "Riouw", *Algemeen Handelsblad*, 25-05-1912

10) Tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh para kuli di bawah koordinasi organisasi komunis disebabkan karena rendahnya upah yang diberikan oleh pemilik perkebunan. Upah yang diberikan sekitar f 0,60 per hari lebih rendah dari seharusnya f 1 per hari. Lebih parahnya lagi, jika ia dan hanya bisa bekerja setengah hari karena sakit maka akan dibayarkan setengah dari f 0,60. ANRI BB No 3488, "*Kantoor voor Chinesche Zaken No 320*", Batavia Centrum, den 30 September 1931, hlm. 36-37.

polisi di Kota Tanjungpinang. Polisi segera menangkap 7 orang lainnya yang dicurigai terlibat pembunuhan tersebut. Penyebab pembunuhan ini berawal dari ketidaksepakatan mengenai kontrak kerja di perkebunan nanas tersebut.¹¹

Pembunuhan dan berbagai tindakan kriminalitas lainnya tidak hanya dialami oleh orang-orang Eropa saja, tetapi juga sesama kuli Tionghoa di perkebunan. Permasalahan yang timbul tidak jarang adalah masalah sepele yang akhirnya berimbas pada kematian seseorang seperti peristiwa yang menimpa buruh perkebunan di Kepulauan Riau (lokasi perkebunan tidak diketahui). Pembunuhan ini dilakukan oleh sesama buruh karena memperebutkan seorang wanita. Akibat tindakannya ini, pembunuh mendapat hukuman penjara selama 20 tahun.¹²

Kompleksitas berbagai tindakan kejahatan yang terjadi di Kepulauan Riau mulai dari kerusuhan, pembunuhan dan berbagai kejahatan lainnya bisa jadi disebabkan oleh ketimpangan sosial, ekonomi serta kurangnya perhatian dari Pemerintah Hindia Belanda, penguasa lokal dan pemilik perkebunan. Oleh karena itu, bisa saja tindakan kriminalitas ini sebagai jalan pintas dan bentuk protes dalam menghadapi persoalan hidup terhadap kondisi yang tidak adil.

Untuk menyelesaikan berbagai tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa tersebut, pemerintah menggunakan hukum pidana. Semua perkara diselesaikan melalui pengadilan polisi (*politierol*). Pengadilan polisi adalah pengadilan dengan proses yang cepat dan tanpa dikenakan biaya. Perkara yang ditangani oleh pengadilan polisi adalah perkara yang hukumannya tidak lebih dari 3 bulan kerja paksa atau dengan denda f 100. Pengadilan polisi memiliki citra yang buruk seperti pemeriksaan berkas perkara yang tidak teliti, mengabaikan saksi-saksi dan tindakan abai lainnya. (Sugiasuti, 2003: 300–301)

Hukuman yang diperoleh oleh orang-orang Tionghoa yang melakukan tindakan kriminalitas di Tanjungpinang sesuai dengan penjelasan yang dipaparkan di atas, tetapi untuk hukuman orang pribumi yang melakukan tindakan kriminalitas di *onderafdeeling* Tanjungpinang ditetapkan berdasarkan hukum adat yang berada di bawah pengawasan karesidenan.¹³ Para kriminal yang sudah dihukum tersebut menjalani hukuman penjara yang terletak di Kota Tanjungpinang.¹⁴

11) "De Moord op Riouw", *Het Nieuws* 21-05-1929 No 112, Lihat lebih lanjut dalam, "Het Drama op Riouw de Vermoorde Britische Planter", *De Indische Courant* 24-05-1929; "Nieuws Uit Indie een Engelsche Planter Vermoord", *Provinciale Drentsche en Asser Courant*, 13-06-1929; "Oost Indie: Alleen Tusschen Chineezzen, Door Koelies Afgemaakt een Drama op Riouw"; *Nieuwe Venlosche Courant* 17-06-1929.

12) "Twintig jaar wegens moord", *Het Nieuws van Den Dag Voor Nederlandsch* 27-12-1938.

13) P Wink, *MvO*, 1930, hlm. 68

14) P Wink, *MvO*, 1930, hlm. 74.

Kesimpulan

Kongsi besar yang cukup mencuri perhatian di Tanjungpinang terdiri atas 3 kelompok yakni Ngee Heng (Ghi Hin atau Ghee Hin), Quan Teck Hoe, dan Gagak Putih. Setiap kongsi didominasi oleh suku-suku berbeda yang memiliki kepentingan ekonomi, politik, dan sosial masing-masing. Ambisi dalam bidang yang sama, pada gilirannya, membuat setiap kongsi saling berkompetisi untuk mencapai tujuannya. Bahkan, jika penguasa lokal memihak pada salah satu kongsi, kompetisi tersebut sering kali berujung konflik.

Selain konflik yang terjadi antarkongsi, tindakan kriminalitas yang dilakukan, ataupun dikoordinasi oleh kongsi di belakang layar tidak bisa diabaikan. Berbagai tindakan kriminal seperti pembunuhan terhadap pemilik perkebunan, pencurian, dan tindakan kriminal lainnya terjadi karena ketimpangan ekonomi dan sosial. Bahkan, untuk mempersempit ruang gerak kongsi yang dianggap merugikan pemerintah dengan segala aktivitasnya, pemerintah juga mengeluarkan aturan pembubaran seluruh kongsi yang dianggap “kriminal” seperti Ngee Heng (Ghi Hin atau Ghee Hin), Quan Teck Hoe pada 1907. Kemudian pada 1923, seluruh kongsi dibubarkan secara paksa.

Pembubaran kongsi-kongsi yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda memperlihatkan dominasi kolonialisme terhadap koloninya. Akan tetapi, pembubaran tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah kemudian kongsi ini bisa dikategorikan sebagai gerakan progresif (suatu gerakan pembaharuan yang muncul karena pengaruh dari luar berupa ideologi seperti komunisme dan nasionalisme) ataukah reaksioner (gerakan yang muncul akibat tekanan yang diperoleh secara terus menerus?). Kongsi tidak lebih sebagai sebuah minoritas aktif yang ingin membela kepentingannya sendiri baik secara legal maupun secara ilegal dalam kacamata kolonial. Ia merupakan kekuatan pendukung bagi kekuatan baru dalam politik di Tiongkok yang ikut menyebar hingga ke Nusantara terutama Tanjungpinang.

Referensi

Arsip yang Belum Dipublikasikan

Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia

Koloniaal Verslag, 1862.

Koloniaal Verslag, 1915

Kolonial Verslag, 1924

Regeerings- Almanak voor Nederlandsch- Indie, 1912,

Alg Sec GB TZG AG No 7659, “*Vervolg Memorie Betreffende de Residentie Riouw*”.

W Schols, *MvO*, 1938.

P Wink, *MvO*, 1930.

BB No 3488, “*Kantoor voor Chineesche Zaken No 320*”, Batavia Centrum, den 30 September 1931.

Majalah dan Surat Kabar

Algemeen Handelsblad, "Riouw", 25-05-1912.

De Indische Courant, "Het Drama op Riouw de Vermoorde Britische Planter", 24-05-1929.

De Maasbode, "Uit Onze Oost: De Chineezzen Kwestie", 05-03-1913 No 12325.

Het Nieuws van Den Dag Voor Nederlandsch, "Twintig jaar wegens moord", 27-12-1938.

Het Nieuws, "De Moord op Riouw", 21-05-1929 No 112

Nieuwe Venlosche Courant, "Oost Indie: Alleen Tusschen Chineezzen, Door Koelies Afgemaakt een Drama op Riouw", 17-06-1929.

Provinciale Drentsche en Asser Courant, "Nieuws Uit Indie een Engelsche Planter Vermoord", 13-06-1929.

Artikel Jurnal

Chan, Ying-kit (2016). 'The Founding of Singapore and the Chinese Kongsis of West Borneo (ca.1819–1840). *Journal of Cultural Interaction in East Asia* 7: 99-121.

Sugiri Kustedja (2016). 'Republik' Lanfang Kongsis di Kalimantan Barat'. *Jurnal Sosioteknologi* 15,2: 255–266.

Trocki, Carl A (1976). 'The Origins of the Kangchu System 1740–1860'. *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* 49, 2: 132–133.

Ibrahim *et al* (2019). 'From Kongsis to Sakan: Tracking the Transformation of Chinese Influence in the Worker Organization and Tin Production on Bangka Island'. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 353 012044. Doi: 10.1088/1755–1315/353/1/012044.

Buku

Ali Haji Ibn Ahmad, Raja. (1982). *The Precious Gift (Tuhfat Al-Nafis)*. Translated by Barbara Andaya & Virginia Matheson. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Begbie, Peter James. (1967). *The Malayan Peninsula*. Oxford University Press

Buckley, Charles B. (1902). *An Anecdotal History of Old Times in Singapore*, Singapore: First Published Singapore.

Comber, Leon. (1959). *Chinese Secret Societies in Malaya: A Survey of the Triad Society from 1800–1900*, New York: Locust Valley.

Heidhues, Mary Somers (2008). *Penambang Emas, Petani, dan Pedagang di "Distrik Tionghoa" Kalimantan Barat*. Jakarta: Yayasan Nabil.

Natasya Yunita Sugiastuti. (2003). *Tradisi Hukum Cina Negara dan Masyarakat: Studi Mengenai Peristiwa-peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial 1870-1942*. UI: Program Pascasarjana Fakultas Hukum.

Purcell, Victor (1967). *Orang-orang China di Tanah Melayu*. Nik Hasnaa Nik Mahmood. Oxford University Press.

Tagliacozzo, Eric (2005). *Secret Trades, Porous Borders: Smuggling and States Along a Southeast Asian Frontier, 1865–1915*. New Haven and London: Yale University Press.

Tanpa nama. (1994). *Buku Sejarah Sekolah Toan Pun di Kepulauan Riau, Tiongkok: Penerbit Hokkian Nan Peng. (buku asli bahasa dan tulisan "Cina")*

Trocki, Carl. (2013). *Prince of Pirates: The Temanggongs and the Development of Johor and Singapore 1784–1885*. Singapore: NUS Press.

Artikel dalam Buku

- Trocki, Carl A. (2016). "Knowledge Management in the World of 18th Century Chinese Business In Dunn, Janet, Eds, *Proceedings: The Third International Research Conference 'Chinese Entrepreneurship and Asian Business Networks'*" Value creation through knowledge Governance, 22 (2).
- Lyons, L., Ford, M. (2013). The Chinese of Karimun: Citizenship and Belonging at Indonesia's Margins. In Siew-Min Sai, Chang-Yau Hoon (eds), *Chinese Indonesians Reassessed: History, Religion and Belonging*. London and New York: Routledge.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi

- Peng, Wang Tai (1977). (A Thesis, "The Origins of Chinese Kongsi With Special Reference to West Borneo", Australian National University, Australia)
- Xiaodong, Xu (2015), "Genesis as a Growth Triangle in South East Asia: A Study of Economic Connections Between Singapore, Johor and Riau Islands 1870–1970s", *Doctoral Thesis*, Universiteit Leiden, <http://hdl.handle.net/1887/360622015-11-04> diakses pada 24-08-2017.

Wawancara

- Joni (Huang Chuang), Senggarang, 13-12-2017